

ABSTRAK

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

Oleh

FITDIA NIZILIL ASKI

Pemerintah sebagai penyelenggara negara merupakan elemen utama dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam hal pengangkatan tenaga honorer. Seperti di Kabupaten Mesuji, berdasarkan data seleksi berkas BKD tahun 2014 jumlah honorer yang lolos berkas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 300 guru honorer. Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS tersebut didasarkan pada hasil *listing* Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2010 terhadap tenaga honorer yang belum masuk dalam *database* BKN pada tahun-tahun sebelumnya. Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Mesuji, dan fokus pada prinsip transparansi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di

Kabupaten Mesuji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap sejumlah informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah terlaksana dengan baik namun belum maksimal. BKD telah melaksanakan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 48 tahun 2005 jo. PP No.43 tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tenaga honorer yang terdata sesuai dengan persyaratan/prosedur yakni kesesuaian usia, masa kerja dan sumber pembiayaan. Namun, masih ada tenaga honorer yang mengaku bahwa BKD tidak menyebarkan informasi secara transparan karena tidak begitu jelas dalam menyebarkan informasi penerimaan CPNS.

Kata Kunci: *Good Governance*, transparansi, CPNS